



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA



Periode
Juli s.d Desember 2022

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
TAHUN 2022



LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**

Disahkan di Sidoarjo

Pada Hari Kamis, 30 Desember 2021

Sekretaris Tim Survei

Tigor Parlilitan Hasugian, S.IP.,S.H.
NIP 19690522 1992 03 1 003

Ketua Tim Survei

Anwar, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 11960010750569

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III

Faizal Faisal, S.H.,M.H.
Brigadir Jenderal TNI



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan di jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Adapun kegiatan yang mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kepada masyarakat adalah dengan mengadakan Survei Indeks Persepsi Korupsi untuk membangun Zona Integritas di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Outcome dari pembangunan Zona Integritas adalah terbentuknya WBK/WBBM di satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Pembangunan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya khususnya dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada umumnya. Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan dan perubahan peraturan yang memuat indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK dan WBBM, yang mengarah kepada terwujudnya **zero tolerance approach** (pendekatan tanpa toleransi) dalam pemberantasan korupsi. Perjalanan untuk mencapai Visi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan badan peradilan yang agung khususnya di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membutuhkan integritas, kerja keras, komitmen, keyakinan dan kerja sama.

Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sidoarjo, Desember 2021
Kep. Pengadilan Militer Tinggi III



Faridah Faisal, S.H.,M.H.
Brigadir Jenderal TNI



DAFTAR ISI

| | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GRAFIK | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan | 1 |
| 1.3 Landasan Hukum | 1 |
| 1.4 Rencana Kerja | 2 |
| | |
| BAB II METODOLOGI | |
| 2,1 Metode Penelitian | 3 |
| 2.2 Populasi dan Sampel | 3 |
| 2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis | 3 |
| 2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control | 3 |
| 2.5 Teknik Analisa Data | 3 |
| 2.6 Tahapan Pelaksanaan | 4 |
| | |
| BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI | |
| 3.1 Profil Responden | 6 |
| 3.2 Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator | 8 |
| 3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan | 14 |
| 3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan | 15 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| 4,1 Kesimpulan | 17 |
| 4.2 Rekomendasi | 17 |
| | |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| <i>Tabel</i> | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| 2.1 Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas | 4 |
| 2.2 Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi | 5 |
| 2.3 Nilai Indeks Persepsi Korupsi | 5 |
| 3.1 Jenis Kelamin Responden | 6 |
| 3.2 Tingkat Pendidikan Responden | 6 |
| 3.3 Jenis Pekerjaan Responden | 7 |
| 3.4 Kelompok Usia Responden | 8 |
| 3.5 Indeks Indikator Manipulasi Peraturan | 8 |
| 3.6 Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan | 9 |
| 3.7 Indeks Indikator Menjual Pengaruh | 10 |
| 3.8 Indeks Indikator Transaksi Biaya | 10 |
| 3.9 Indeks Indikator Biaya Tambahan | 11 |
| 3.10 Indeks Indikator Hadiah | 11 |
| 3.11 Indeks Indikator Transparansi Biaya | 12 |
| 3.12 Indeks Indikator Percaloan | 13 |
| 3.13 Indeks Indikator Perbuatan Curang | 13 |
| 3.14 Indeks Indikator Transaksi Rahasia | 14 |
| 4 Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | 15 |
| 5 Persepsi Indeks Korupsi Pengadilan Militer III Surabaya | 15 |

**DAFTAR GRAFIK**

| <i>Grafik</i> | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| 3.1 Jenis Kelamin Responden | 6 |
| 3.2 Tingkat Pendidikan Responden | 7 |
| 3.3 Jenis Pekerjaan Responden | 7 |
| 3.4 Kelompok Usia Responden | 8 |
| 3.5 Indeks Indikator Manipulasi Peraturan | 9 |
| 3.6 Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan | 9 |
| 3.7 Indeks Indikator Menjual Pengaruh | 10 |
| 3.8 Indeks Indikator Transaksi Biaya | 10 |
| 3.9 Indeks Indikator Biaya Tambahan | 11 |
| 3.10 Indeks Indikator Hadiah | 12 |
| 3.11 Indeks Indikator Transparansi Biaya | 12 |
| 3.12 Indeks Indikator Percaloan | 13 |
| 3.13 Indeks Indikator Perbuatan Curang | 14 |
| 3.14 Indeks Indikator Transaksi Rahasia | 14 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik **accidental sampling**. **Accidental sampling** adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

2.4 Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan.

Adapun alur penyusunan **tools** untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 2.1
Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas



Tabel 2.2

Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

| No | Ruang lingkup |
|----|------------------------|
| 1 | Manipulasi Peraturan |
| 2 | Penyalahgunaan Jabatan |
| 3 | Menjual Pengaruh |
| 4 | Transaksi Biaya |
| 5 | Biaya Tambahan |
| 6 | Hadiah |
| 7 | Transparansi Biaya |
| 8 | Percaloan |
| 9 | Perbuatan Curang |
| 10 | Transaksi Rahasia |

Tabel 2.3

Nilai Indeks Persepsi Korupsi

| Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi IPK | Pelayanan | | |
|----------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------------------------|
| | | | | Mutu | Kinerja |
| 1 | 1,00 - 1,75 | 25,00 - 43,75 | D | Tidak Baik | Tidak bersih dari korupsi |
| 2 | 1,76 - 2,50 | 43,76 - 62,50 | C | Kurang Baik | Kurang bersih dari korupsi |
| 3 | 2,51 - 3,25 | 62,51 - 81,25 | B | Baik | Cukup bersih dari korupsi |
| 4 | 3,26 - 4,00 | 81,26 - 100,00 | A | Sangat Baik | Bersih dari korupsi |

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

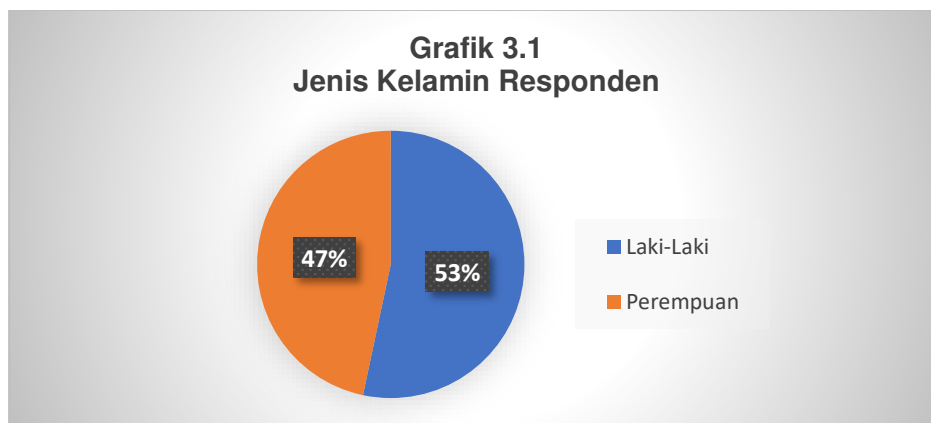
3.1 Profil Responden

3.1.1 Jenis Kelamin Responden

Dari sisi jenis kelamin responden, menunjukkan bahwa sebesar **53,33% (16 orang)** responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki jenis kelamin sebagai **Laki - Laki**.

Tabel 3.1
Jenis Kelamin Responden

| No. | Jenis Kemin | Frekuensi | Persentase (%) |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 | Laki-Laki | 16 | 53,33 |
| 2 | Perempuan | 14 | 46,67 |
| Jumlah : | | 30 | 100,00 |

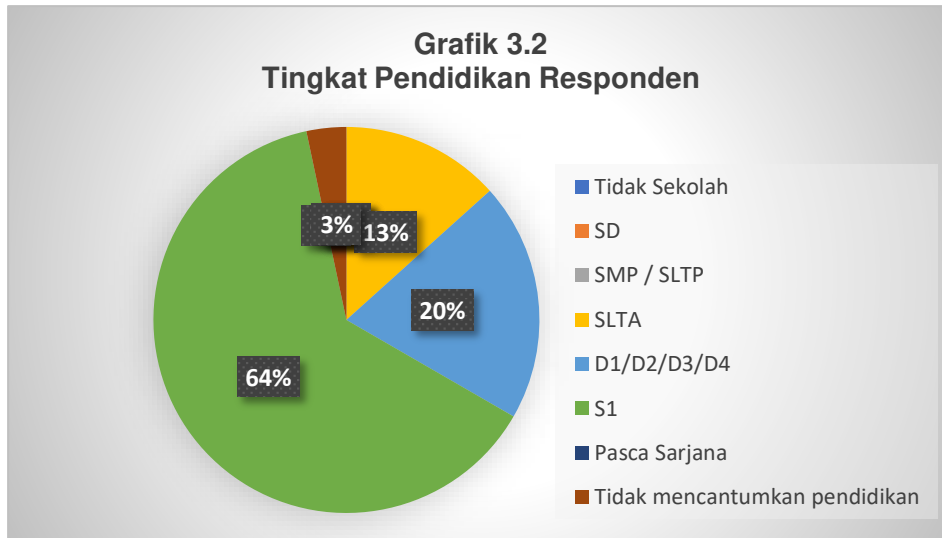


3.1.2 Tingkat Pendidikan Responden

Dari sisi tingkat pendidikan responden, menunjukkan bahwa sebesar **63,33% (19 orang)** responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki pendidikan sebagai **S1**.

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan Responden

| No. | Pendidikan Terakhir | Frekuensi | Persentase (%) |
|-----------------|-------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Tidak Sekolah | 0 | 0,00 |
| 2 | SD | 0 | 0,00 |
| 3 | SMP / SLTP | 0 | 0,00 |
| 4 | SLTA | 4 | 13,33 |
| 5 | D1/D2/D3/D4 | 6 | 20,00 |
| 6 | S1 | 19 | 63,33 |
| 7 | Pasca Sarjana | 0 | 0,00 |
| 8 | Tidak mencantumkan pendidikan | 1 | 3,33 |
| Jumlah : | | 30 | 100,00 |

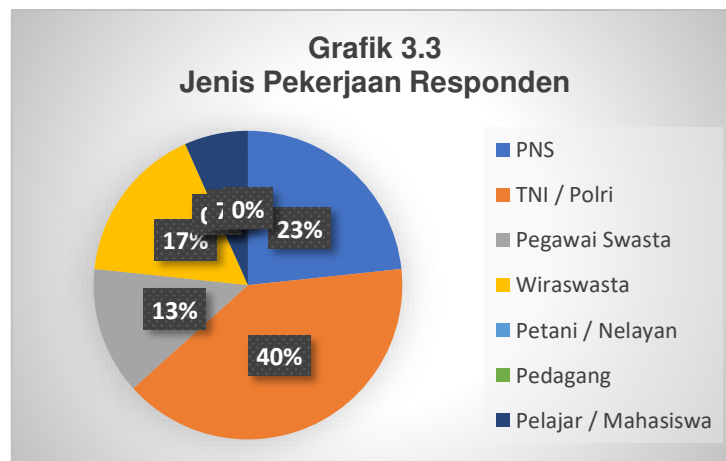


3.1.3 Jenis Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **40,00% (12 orang)** responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki pekerjaan sebagai **TNI/Polri**.

Tabel 3.3
Jenis Pekerjaan Responden

| No. | Pekerjaan Utama | Frekuensi | Persentase (%) |
|-----------------|---------------------|-----------|----------------|
| 1 | PNS | 7 | 23,33 |
| 2 | TNI / Polri | 12 | 40,00 |
| 3 | Pegawai Swasta | 4 | 13,33 |
| 4 | Wiraswasta | 5 | 16,67 |
| 5 | Petani / Nelayan | 0 | 0,00 |
| 6 | Pedagang | 0 | 0,00 |
| 7 | Pelajar / Mahasiswa | 2 | 6,67 |
| 8 | Lainnya ----- | 0 | 0,00 |
| Jumlah : | | 30 | 100,00 |

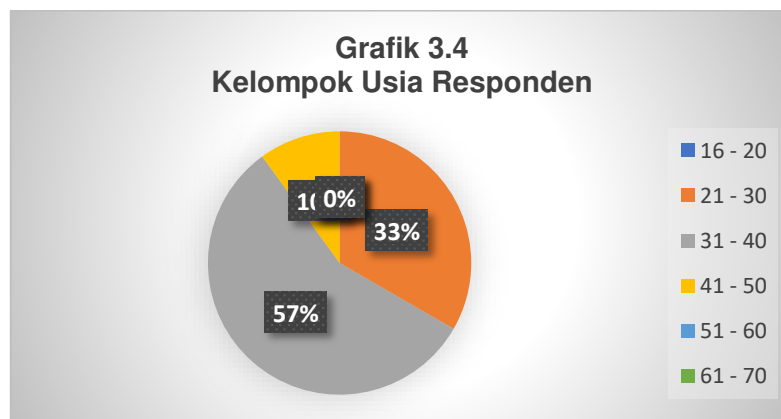


3.1.4 Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara **31 tahun s/d 40 tahun (56,67%)**. Bagi kelompok usia di atas 50 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

Tabel 3.4
Kelompok Usia Responden

| No. | Usia / Umur | Frekuensi | Persentase (%) |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 | 16 - 20 | 0 | 0,00 |
| 2 | 21 - 30 | 10 | 33,33 |
| 3 | 31 - 40 | 17 | 56,67 |
| 4 | 41 - 50 | 3 | 10,00 |
| 5 | 51 - 60 | 0 | 0,00 |
| 6 | 61 - 70 | 0 | 0,00 |
| Jumlah : | | 30 | 100,00 |



3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

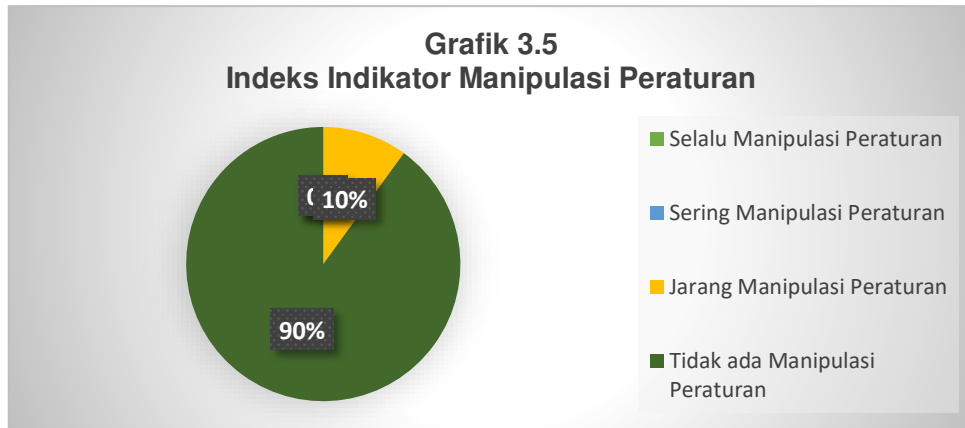
3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,90**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari tindakan manipulasi peraturan**.

Tabel 3.5.
Indeks Indikator Manipulasi Peraturan

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | Persentase (%) | NRR |
|-----------------|--------------------------------|------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | Selalu Manipulasi Peraturan | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sering Manipulasi Peraturan | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jarang Manipulasi Peraturan | 3 | 3 | 10,00 | 9,00 |
| 4 | Tidak ada Manipulasi Peraturan | 4 | 27 | 90,00 | 108,00 |
| Jumlah : | | | 30 | 100,00 | 3,90 |



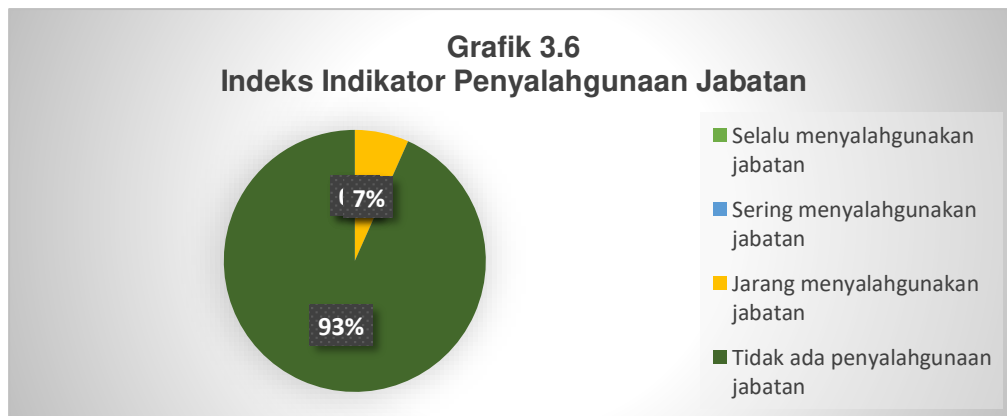
3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,93**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari tindakan penyalahgunaan jabatan**.

Tabel 3.6
Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | Persentase (%) | NRR |
|-----------------|----------------------------------|------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | Selalu menyalahgunakan jabatan | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sering menyalahgunakan jabatan | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jarang menyalahgunakan jabatan | 3 | 2 | 6,67 | 6,00 |
| 4 | Tidak ada penyalahgunaan jabatan | 4 | 28 | 93,33 | 112,00 |
| Jumlah : | | | 30 | 100,00 | 3,93 |



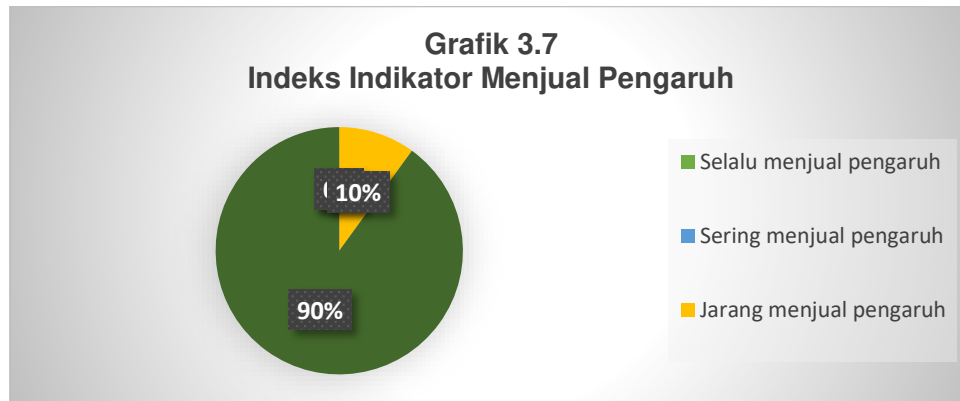
3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,90**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari tindakan menjual pengaruh**.

Tabel 3.7
Indeks Indikator Menjual Pengaruh

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | Persentase (%) | NRR |
|-----------------|------------------------------|------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | Selalu menjual pengaruh | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sering menjual pengaruh | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jarang menjual pengaruh | 3 | 3 | 10,00 | 9,00 |
| 4 | Tidak ada penjualan pengaruh | 4 | 27 | 90,00 | 108,00 |
| Jumlah : | | | 30 | 100,00 | 3,90 |



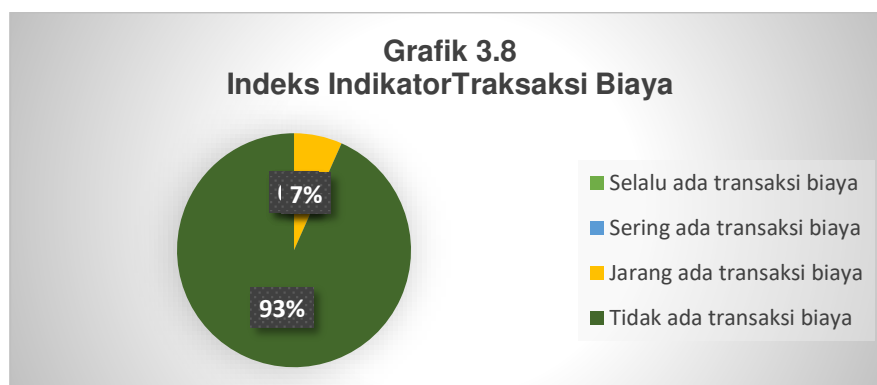
3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,87**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari tindakan adanya transaksi biaya**.

Tabel 3.8
Indeks Indikator Transaksi Biaya

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | Persentase (%) | NRR |
|-----------------|----------------------------|------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | Selalu ada transaksi biaya | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sering ada transaksi biaya | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jarang ada transaksi biaya | 3 | 4 | 13,33 | 12,00 |
| 4 | Tidak ada transaksi biaya | 4 | 26 | 86,67 | 104,00 |
| Jumlah : | | | 30 | 100,00 | 3,87 |



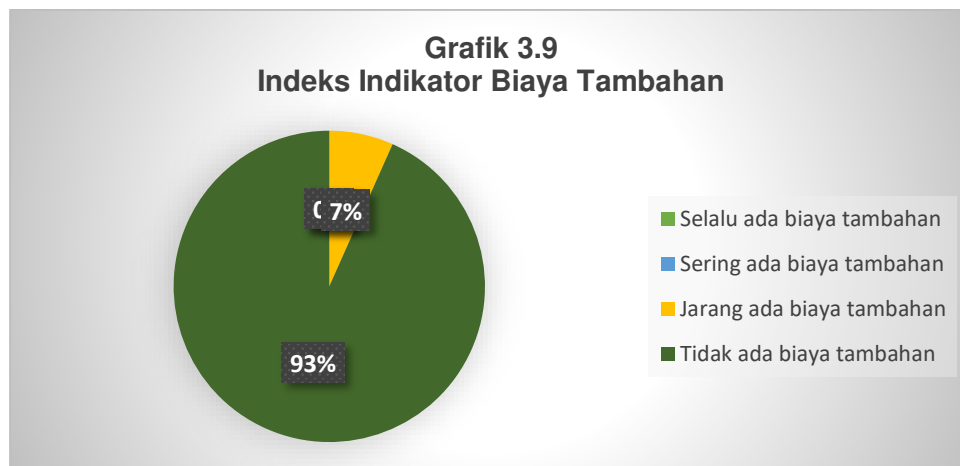
3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,93**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari adanya tindakan biaya tambahan**.

Tabel 3.9
Indeks Indikator Biaya Tambahan

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | Persentase (%) | NRR |
|-----------------|---------------------------|------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | Selalu ada biaya tambahan | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sering ada biaya tambahan | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jarang ada biaya tambahan | 3 | 2 | 6,67 | 6,00 |
| 4 | Tidak ada biaya tambahan | 4 | 28 | 93,33 | 112,00 |
| Jumlah : | | | 30 | 100,00 | 3,93 |



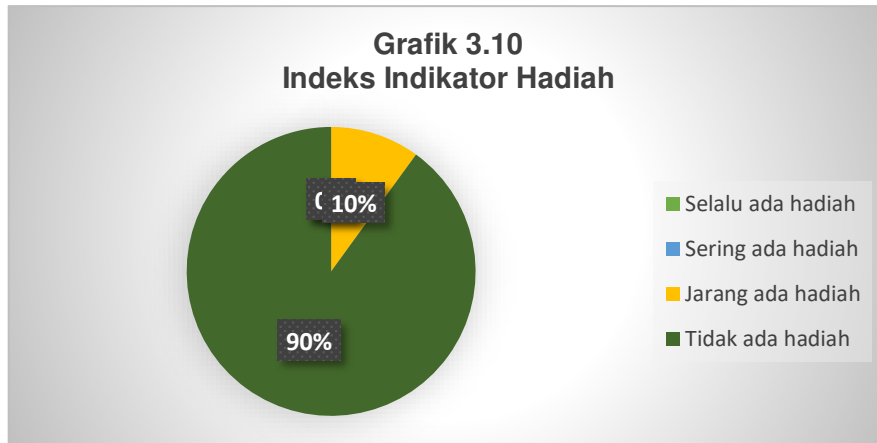
3.2.6 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,90**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari adanya tindakan pemberian hadiah**.

Tabel 3.10
Indeks Indikator Hadiah

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | Persentase (%) | NRR |
|-----------------|-------------------|------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | Selalu ada hadiah | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sering ada hadiah | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jarang ada hadiah | 3 | 3 | 10,00 | 9,00 |
| 4 | Tidak ada hadiah | 4 | 27 | 90,00 | 108,00 |
| Jumlah : | | | 30 | 100,00 | 3,90 |



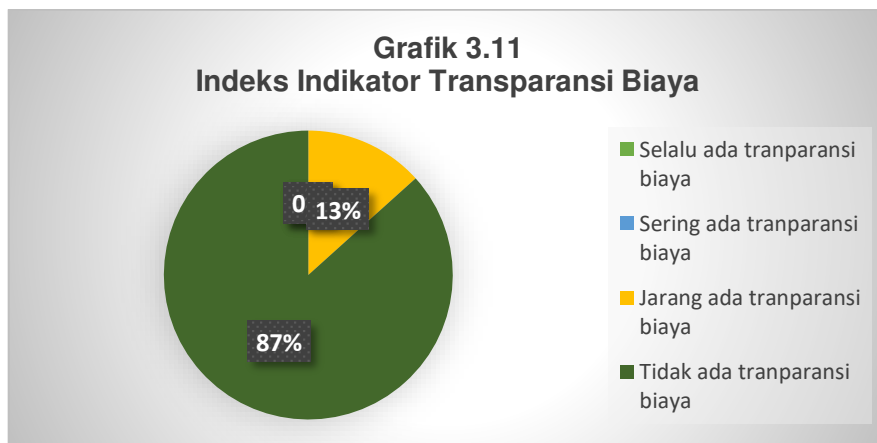
3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,87**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari adanya tindakan transparansi biaya**.

Tabel 3.11
Indeks Indikator Transparansi Biaya

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | Persentase (%) | NRR |
|----------------|------------------------------|------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | Selalu ada tranparansi biaya | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sering ada tranparansi biaya | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jarang ada tranparansi biaya | 3 | 4 | 13,33 | 12,00 |
| 4 | Tidak ada tranparansi biaya | 4 | 26 | 86,67 | 104,00 |
| Jumlah: | | | 30 | 100,00 | 3,87 |



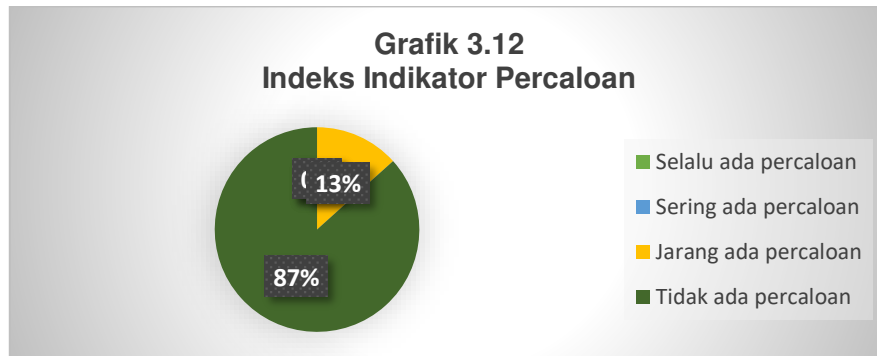
3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,87**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari adanya tindakan percaloan**.

Tabel 3.12
Indeks Indikator Percaloan

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | Persentase (%) | NRR |
|-----------------|----------------------|------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | Selalu ada percaloan | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sering ada percaloan | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jarang ada percaloan | 3 | 4 | 13,33 | 12,00 |
| 4 | Tidak ada percaloan | 4 | 26 | 86,67 | 104,00 |
| Jumlah : | | | 30 | 100,00 | 3,87 |



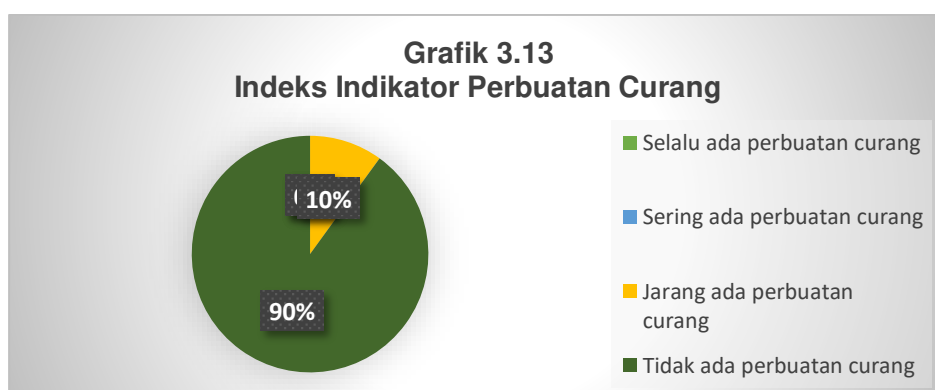
3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,90**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari adanya tindakan perbuatan curang**.

Tabel 3.13
Indeks Indikator Perbuatan Curang

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | Persentase (%) | NRR |
|-----------------|-----------------------------|------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | Selalu ada perbuatan curang | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sering ada perbuatan curang | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jarang ada perbuatan curang | 3 | 3 | 10,00 | 9,00 |
| 4 | Tidak ada perbuatan curang | 4 | 27 | 90,00 | 108,00 |
| Jumlah : | | | 30 | 100,00 | 3,90 |



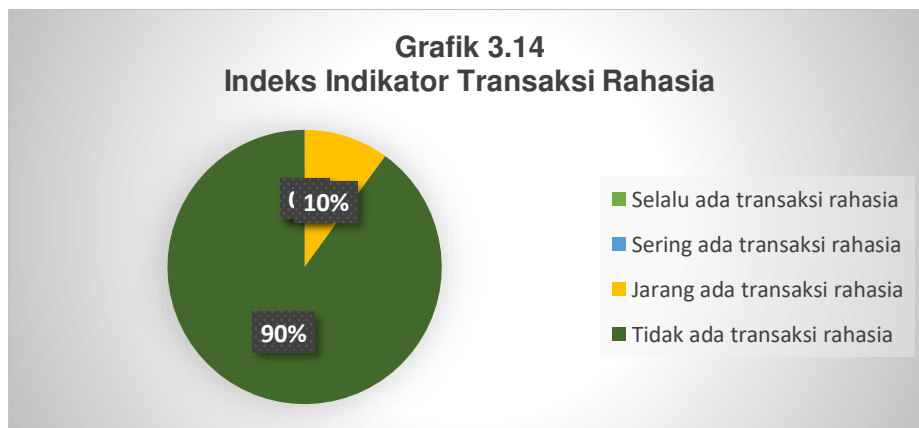
3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,90**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari adanya tindakan transaksi rahasia**.

Tabel 3.14
Indeks Indikator Transaksi Rahasia

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | Persentase (%) | NRR |
|-----------------|------------------------------|------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | Selalu ada transaksi rahasia | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sering ada transaksi rahasia | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jarang ada transaksi rahasia | 3 | 3 | 10,00 | 9,00 |
| 4 | Tidak ada transaksi rahasia | 4 | 27 | 90,00 | 108,00 |
| Jumlah : | | | 30 | 100,00 | 3,90 |



3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh **Indeks Persepsi Korupsi (IPK)** satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III sebesar **97,34**

Indeks **97,25** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **81,26 – 100,00**.

Tabel 4
Indeks Persepsi Korupsi
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

| No | Ruang Lingkup (RL) | NRR per RL | NRR Tertimbang | IPK per RL | Kinerja |
|----|------------------------|------------|----------------|------------|---------------------|
| 1 | Manipulasi Peraturan | 3,90 | 0,39 | 97,50 | Bersih dari korupsi |
| 2 | Penyalahgunaan Jabatan | 3,93 | 0,39 | 98,25 | Bersih dari korupsi |
| 3 | Menjual Pengaruh | 3,90 | 0,39 | 97,50 | Bersih dari korupsi |
| 4 | Transaksi Biaya | 3,87 | 0,39 | 96,68 | Bersih dari korupsi |
| 5 | Biaya Tambahan | 3,93 | 0,39 | 98,25 | Bersih dari korupsi |
| 6 | Hadiah | 3,90 | 0,39 | 97,50 | Bersih dari korupsi |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|------|--------------|-------|---------------------|
| 7 | Transparansi Biaya | 3,87 | 0,39 | 96,68 | Bersih dari korupsi |
| 8 | Percaloan | 3,87 | 0,39 | 96,68 | Bersih dari korupsi |
| 9 | Perbuatan Curang | 3,90 | 0,39 | 97,50 | Bersih dari korupsi |
| 10 | Traksaksi Rahasia | 3,90 | 0,39 | 97,50 | Bersih dari korupsi |
| Jumlah NRR Tertimbang : | | | 3,90 | | |
| Indeks Persepsi Korupsi : | | | 97,40 | | |

Tabel 5
Persepsi Indeks Korupsi
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

| Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi IPK | Pelayanan | | |
|----------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------------------------|
| | | | | Mutu | Kinerja |
| 1 | 1,00 - 1,75 | 25,00 - 43,75 | D | Tidak Baik | Tidak bersih dari korupsi |
| 2 | 1,76 - 2,50 | 43,76 - 62,50 | C | Kurang Baik | Kurang bersih dari korupsi |
| 3 | 2,51 - 3,25 | 62,51 - 81,25 | B | Baik | Cukup bersih dari korupsi |
| 4 | 3,26 - 4,00 | 81,26 - 100,00 | A | Sangat Baik | Bersih dari korupsi |

3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Adapun masukan dan pandangan dari responden adalah sebagai berikut :

1. Masukan dan Pandangan Responden 03
 - Pelayanan sudah baik;
2. Masukan dan Pandangan Responden 05
 - Sudah baik pelayanannya;
3. Masukan dan Pandangan Responden 09
 - Agar putusan Hakim berdasarkan pertimbangan yang matang supaya dapat memberikan rasa keadilan;
4. Masukan dan Pandangan Responden 14
 - Petugas pelayanan terkadang tidak ada di tempat;
5. Masukan dan Pandangan Responden 17
 - Petugas pelayanannya sangat ramah, semoga makin lama akan semakin lebih baik;
6. Masukan dan Pandangan Responden 21
 - Informasi yang diberikan, terkadang kurang informatif;
7. Masukan dan Pandangan Responden 25
 - Pelayanan di Dilmilti Surabaya agar ditingkatkan lebih baik lagi;
8. Masukan dan Pandangan Responden 27
 - Petugas seharusnya selalu stanby di tempat sehingga memudahkan proses pelayanan;

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Indeks Persepsi Korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki **Indeks Persepsi Korupsi 97,40**. atau masuk pada kategori dengan mutu pelayanan **Sangat Baik** dan kinerja pelayanan **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 (sepuluh) indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 97,50;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 98,25;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 97,50;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 96,68;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 98,25;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 97,50;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 96,68;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 96,68;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 97,50;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 97,50;

4.2 Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya periode bulan Juli s.d Desember Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki **indeks di atas 81,26** atau masuk pada persepsi dengan mutu pelayanan **sangat baik** dan kinerja pelayanan **bebas dari korupsi**.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Transaksi Biaya, Transparansi Biaya, Percaloan** dan **Transaksi Rahasia** memiliki indeks paling rendah yakni **96,68** diantara indikator lainnya.

Kepada seluruh jajaran manajemen dan seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada semua pencari keadilan di semua ruang lingkup pelayanan yakni:

- a. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bagian harus disosialisasikan lagi,
- b. Bahwa seluruh pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya harus lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



LAMPIRAN

ANALISA DATA
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
PERIODE JULI S.D DESEMBER
TAHUN 2022

| No. Responden | NILAI KUISIONER INDEKS PERSEPSI KORUPSI | | | | | | | | | | Keterangan |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Jumlah | 117 | 118 | 117 | 116 | 118 | 117 | 116 | 116 | 117 | 117 | |
| NRR per RL | 3,900 | 3,933 | 3,900 | 3,867 | 3,933 | 3,900 | 3,867 | 3,867 | 3,900 | 3,900 | |
| NRR Tertimbang | 0,390 | 0,393 | 0,390 | 0,387 | 0,393 | 0,390 | 0,387 | 0,387 | 0,390 | 0,390 | 3,897 |
| IKM terhadap PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN | | | | | | | | | | | 97,42 |

Keterangan :

NRR : Nilai rata-rata

RL : Ruang Lingkup Pelayanan

IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat

* : Jumlah NRR IKM Tertimbang

** : Jumlah NRR Tertimbang x 25

NRR per RL : Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi

NRR : NRR per Ruang Lingkup x (1/9)

Tertimbang

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00

B (Baik) : 62,51 - 81,25

C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50

D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75

Ruang Lingkup Pelayanan :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparasi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Jl. Raya Ir. Haji Juanda No. 87, Sidoarjo 61253
 Web : www.dilmilti3-surabaya.go.id ; Telp/Fax 031-8671763, 99681347
 Email : milti.surabaya@dilmil.org

Nomor Responden : (diisi petugas)

KUISIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu/Sdr/i Pengguna Layanan
 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr./i terpilih sebagai responden penelitian kami. Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei ini menayakan pendapat pengguna layanan mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap bapak/ibu/sdr./i.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan bapak/ibu/sdr./i untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sidoarjo,.....202.....

Tim Survei

**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TAHUN 202.....**

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : _____ (boleh inisial)
2. Instansi/Perusahaan : _____
3. Umur (Tahun) : _____
4. Nomor Telp / HP : _____
5. Jenis Kelamin : 1. Laki – laki 2. Perempuan
6. Pendidikan terakhir : 1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
2. SD 6. Sarjana (S1)
3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
4. SLTA
7. Pekerjaan Utama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan
2. TNI/Polri 6. Pedagang
3. Pegawai Swasta 7. Pelajar / Mahasiswa
4. Wiraswasta 8. Lainnya _____
8. Jenis Layanan Yang Diterima : _____ (Misal: Persidangan, Upaya hukum, informasi, dll)

PETUNJUK :

- Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
- Cara pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER :

| Pertanyaan-pertanyaan Survei | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|-----------|-----------------|
| Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i) | | Selalu | Sering | Jarang | Tidak ada | Kode Pengolahan |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Eksternal | | | | | | |
| 1. | Apakah pelayanan oleh petugas tidak sesuai prosedur dan ketentuan dan dipersulit untuk maksud tertentu ? (Manipulasi Peraturan) | 1 | 2 | 3 | 4 | |

| Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i) | | Selalu | Sering | Jarang | Tidak ada | Kode Pengolahan |
|---|---|--------|--------|--------|-----------|-----------------|
| 2. | Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan oleh petugas dengan ada penawaran untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3. | Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara? (Menjual Pengaruh) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4. | Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi Biaya) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5. | Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi dengan ada biaya tambahan ? (Biaya Tambahan) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6. | Apakah ada pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7. | Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 8. | Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (Percaloan) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 9. | Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 10. | Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan ? (Transaksi Rahasia) | 1 | 2 | 3 | 4 | |

Saran masukan dan pandangan pengguna layanan pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya:



PETUGAS PELAKSANA :

1. Petugas:

- Nama : _____
- Tanda Tangan : _____
- Tanggal Pelaksana : _____

2. Pencacah/Penghitung hasil survei:

- Nama : _____
- Tanda Tangan : _____
- Tanggal Pelaksana : _____

3. Pengawas/Pemeriksa:

- Nama : _____
- Tanda Tangan : _____
- Tanggal Pelaksana : _____